

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN WILAYAH KUMUH DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

Alfiandi Wirawan Putra^{1*}, Muhammad Tahir², Jaelan Usman³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the Implementation of Slum Area Eradication Program in Letta Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. This study used qualitative research, the sources of data used primary and secondary, the number of informants was 7 people. Data collection technique used observation, interview and documentation. Data analysis techniques used data reduction steps, data presentation, qualitative data verification, and using triangulation of data validation namely triangulation of sources, techniques, and time. The results of this study showed that the Implementation of Slum Area Eradication Program in Letta Village, Bantaeng district, Bantaeng Regency had been realized optimally, seen from (1) the structured environment that had been realized; (2) the provision of family toilets that had not been realized so that there were still people who used latrines in the beach; (3) adequate supply of water was maximally realized.

Keywords: implementation, slum areas eradication program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam yaitu primer dan sekunder, jumlah informan yaitu 7 orang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pengabsahan data triangulasi yakni triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sudah terealisasikan secara maksimal dilihat dari (1) penataan lingkungan yang sudah terealisasikan; (2) penyediaan jamban keluarga yang belum terealisasikan sehingga masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai; (3) pasokan air yang layak komsusmsi sudah terealisasi secara maksimal.

Kata Kunci: implementasi, program pengentasan wilayah kumuh

* alfiandi@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: (1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, (2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi, (3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

Kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota atau kabupaten karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan

berbagai tantangan yang ada, pemerintah kabupaten bantaeng salah satunya yang menetapkan penanganan perumahan permukiman kumuh sebagai target nasional yang di tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Tujuan dari program kota tanpa kumuh ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan pesisir pantai untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program penangan permukiman kumuh yang dimaksud dalam program (Kotaku) tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah timbulnya kekumuhan baru.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut diatas, kawasan kumuh Lantebung di Kelurahan Letta merupakan salah satu lokasi dari 7 (tujuh) kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng, tepatnya yaitu berada di RT 01/RW 01 dan RT 02/RW 01 dengan luasan kawasan kumuh sebesar 1,52 Ha.

Dengan adanya luasan kawasan kumuh tersebut dan untuk memenuhi target RPJMN dengan pengentasan

kawasan kumuh menjadi 0% (persen), maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang disebut RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman). Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) ini dibuat sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk juga masyarakat, swasta, LSM dan donor dalam menangani kawasan permukiman kumuh guna mendukung terpenuhinya target RPJMN untuk tahun 2015-2019.

Dalam pelaksanaan program Kotaku di daerah pesisir pantai Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ini ada beberapa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan program nya yaitu: (1) ketersediaan air bersih yang layak konsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat khususnya kelurahan letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, (2) masih kurangnya jamban keluarga yang dimiliki masyarakat pesisir Letta mengakibatkan masyarakat Letta menjadikan laut sebagai tempat jambanya, (3) serta penataan lingkungan yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kekumuhan baru.

Dalam Tachjan (2006:63), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik di samping dapat

dipahami sebagai salah satu aktivitas dari adminitrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Anderson (1984:92), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik ada 4 empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: Siapa yang dilibatkan dalam implementasi: Hakikat proses administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan Anderson (1984:92) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan

suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Abidin (2004), menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Masalah lain yang juga sering muncul sehingga implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.

Subarsono (2011:89) menyebutkan beberapa model implementasi kebijakan publik, antara lain dari ahli: Meter dan Horn, Edwards III, Grindle, serta Mazmanian dan Sabatier.

Terdapat 2 dua variabel besar yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle 2016, yaitu konten kebijakan content of policy dan konteks implementasi context of implementation. Variabel konten kebijakan, meliputi Interest affected kepentingan yang dipengaruhi, Type of benefits jenis manfaat, Extent of change envision jangkauan

perubahan yang diinginkan, Site of decision making kedudukan pengambil keputusan, Program implementor, dan Resources committed ketersediaan sumber daya. Variabel konteks implementasi, meliputi Power interest and strategi of actor involed kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Intitution and regime characteristic karakteristik pemerintah dan lembaga dan Compliance and responsiveness kepatuhan dan daya tanggap Variabel konten kebijakan diperinci ke dalam 6 (enam) unsur, yaitu: (1) Interest affected (kepentingan yang dipengaruhi) yaitu Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut, (2) Type of benefits (jenis manfaat) yaitu Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak, (3) Extent of change envision (jangkauan perubahan

yang diinginkan) yaitu Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target groups) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya, (4) Site of decision making (kedudukan pengambil keputusan) Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program, karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya, (5) Program implementor (pelaksana program) Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program. (6) Resources committed (ketersediaan sumber daya) Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel lingkungan atau konteks kebijakan.

Variabel ini meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) Power, interest and strategi of actor involed (kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat) Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Aktor politik akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya Intitution and regime characteristic (karakteristik pemerintah dan lembaga) Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who gets what atau siapa mendapatkan apa, (2) Compliance and responsiveness (kepatuhan dan daya tanggap) Tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai jika para implementor tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhandari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi.

Dye (1976), berpendapat bahwa kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes). Dalam pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Dye (1976) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Proses kebijakan publik umumnya dilakukan mulai tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Ancaman utama selain itu adalah konsistensi implementasi. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2003: 501). Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang

memakan sumber daya/resources paling besar, maka tugas implementasi.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada Di Kampung Lantebung Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena peneliti melihat di Kampung Lantebung Kelurahan Letta kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di laksanakan program kota tanpa kumuh itu belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal dikarenakan karena ketersediaan air bersih yang layak konsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat kelurahan letta , masih kurangnya tempat jamban yang dimiliki masyarakat pesisir letta mengakibatkan masyarakat letta menjadikan laut sebagai tempat jambanya, serta penataan lingkungan yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya lingkungan yang kumuh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alasan karena Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial

dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan program pemerintah dalam menjalankan program Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di Sulawesi selatan yang memiliki luas wilayah 395,83 ^{km²} dengan jumlah penduduk +- 178.699 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan dan desa .secara geografis kabupaten

Bantaeng terletak pada koordinat antara 5o 21' 13" sampai 5o 35' 26" Lintang Selatan dan 119o 51' 42" sampai 120o 05' 27" Bujur Timur.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng NOMOR : 62 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Struktur Organisasi ini bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggung jawab dan pembagian tugas dalam Organisasi tersebut adapun susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.

Konten Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat 2 dua variabel besar yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle yang di tulis oleh Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs.M.Si. pada buku: studi kebijakan publik dan pelayanan publik, konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik 2016, penerbit Alfabeta, Bandung, yaitu konten

kebijakan content of policy dan konteks implementasi context of implementation. Variabel konten kebijakan, meliputi Interest affected kepentingan yang dipengaruhi, Type of benefits jenis manfaat, Extent of change envision jangkauan perubahan yang diinginkan, Site of decision making kedudukan pengambil keputusan, Program implementor, dan Resources committed ketersediaan sumber daya. Variabel konteks implementasi, meliputi Power interest and strategi of actor involed kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Intitution and regime characteristic karakteristik pemerintah dan lembagadan Compliance and responsiveness kepatuhan dan daya tanggap Variabel konten kebijakan diperinci ke dalam 6 (enam) unsur, yaitu:

1. Kepentingan yang Dipengaruhi

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentinganya terancam oleh kebijakan

publik tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan yang di pengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Program Kotaku tidak hanya melibatkan Dinas perumahan, kawasan dan permukiman tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah setempat dalam hal ini bapak lurah letta, badan keswadayaan masyarakat balla'bassia, kelompok swadaya masyarakat kelurahan letta, serta masyarakat itu sendiri dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pesisir letta khususnya

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan mengatakan bahwa:

Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng terealisasikan kepada masyarakat, berkat bantuan lembaga, pemerintah setempat, serta masyarakat dalam pelaksanaan program ini, dengan tujuan meningkatkan infrastruktur serta ekonomi pembangunan daerah dan tetap hidup sehat serta bebas terhadap kumuh, khususnya masyarakat pesisir letta

Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku) bukan hanya

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menjadi pelaksana dalam program ini. dimana pelaksanaan program ini melibatkan para pemangku kepentingan lainnya seperti: lembaga swasta dalam hal ini BKM Balla' bassia, pemerintah setempat dalam hal ini Bapak lurah Letta dan masyarakat Letta sendiri.

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang berkaitan dengan jenis manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Kelurahan Letta dalam program KOTAKU sangat bermanfaat sekali karena masyarakat sudah bisa hidup bersih dan sehat.

Hal tersebut sejalan dengan informan kedua bahwa Manfaat yang dirasakan setelah terlaksana program (Kotaku) ini oleh masyarakat letta khusus nya, memberikan manfaat yang positif karena penyediaan akses jalan yang begitu baik dan penataan lingkungan serta bebas akan kekumuhan.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh Kotaku memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat kelurahan Letta khusus nya daerah pesisir karna penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Jangkauan Perubahan yang Diinginkan

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target groups) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan jangkauan perubahan yang di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa Setelah terlaksana program Kotaku ini tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah mulai terealisasi secara maksimal karena masyarakat sadar akan kesehatan dan bebas

terhadap kumuh serta pemerintah juga menyiapkan kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi setiap harinya untuk mengangkut sampah warga.

Hal tersebut sejalan dengan bahwa dimana masyarakat Letta khususnya Daerah pesisir pantai sadar akan kekumuhan dan menjaga kebersihan lingkungan berkat program Kotaku dimana setiap minggunya masyarakat antusias melaksanakan kerja bakti bersama – sama. hal ini salah satu perubahan masyarakat terhadap kumuh. Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dengan dua informan dimana tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat, terkhusus kepada masyarakat pesisir Kelurahan Letta harus sadar terhadap kebersihan lingkungan dan bebas dari kekumuhan khusus nya di Daerah pesisir pantai.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program, karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di

lapangan yang berkaitan dengan kedudukan pengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa kami sebagai peyelenggara dalam pelaksanaan program (Kotaku) ada beberapa yang menjadi kendala utama di antara nya: penyediaan lahan, dimana masyarakat yang mempunyai lahan pribadi itu tidak ingin memberikan lahanya untuk dipergunakan pembuatan akses jalan setapak, sehingga kami meminta kepada pemerintah setempat dalam hal ini pak lurah untuk meminta kebijakan kepada pemilik lahan untuk di pergunakan sebahagian lahanya untuk akses jalan, sehingga menjadi proses pelaksanaan lambat di laksanakan hasil wawancara.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan menyatakan bahwa setelah saya mendatangi pemilik lahan bernama Sangkala' dan alhasil syukur Alhamdulillah lahan yang tadinya tidak ingin di berikan untuk pembuatan jalan setapak, dan akhirnya ingin diberikan sehingga program Kotaku ini dapat terlaksana.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dengan dua informan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu

tindakan sebagai cara pemecahan suatu masalah.

3. Pelaksana Program

Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksana program Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa Keberhasilan program Kotaku dimana dengan tujuan 100-0-100 dimana 100% untuk sanitasi, 0% untuk kumuh, dan 100% untuk penataan lingkungan Di Kelurahan Letta khususnya Daerah pesisir dengan melakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan seluruh lembaga, maupun elemen masyarakat ikut peran serta dalam memberantas kekumuhan dengan melakukan kerja sama yang baik dalam melaksanakan program Kotaku Hal tersebut sejalan dengan pernyataan mengatakan bahwa: Jadi pelaksanaan program (Kotaku) ini dibawah oleh bidang perumahan dan permukiman

yang terdiri dari beberapa seksi, yang bekerja sama dengan lembaga masyarakat sehingga kordinasi pelaksanaan ini lancar. Dimana peneliti dapat menyimpulkan hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku) bukan hanya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menjadi pelaksana dalam program ini. dimana pelaksanaan program ini melibatkan para pemangku kepentingan lainya seperti: lembaga swasta, pemerintah setempat dan masyarakat sendiri.

Ketersediaan Sumber Daya

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program (Kotaku) ini untuk anggaran yang digunakan yaitu sebesar 500 juta dengan dibagi ke tiga KSM yang bekerja sama untuk di kerjakan program yang sesuai dengan juknis, dengan menggunakan jasa masyarakat letta sendiri. dan dalam satu KSM itu

menyiapkan pekerja sebanyak 5 anggota dimana pekerjaan tersebut dibagi dalam: perbaikan jalan, penataan lingkungan, dan pasokan air layak komsusmsi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Syukur Alhamdulillah program Kotaku ini dilaksanakan sesuai dengan juknis atau petunjuk yang memenuhi pekerjaan dimana partisipasi masyarakat yang antusias dalam bekerja dalam memaksimalkan anggaran yang didapatkan oleh KSM lantebung.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan bahwa ketersediaan sumber daya itu merupakan proses yang paling terpenting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Dimana suatu implementasi tidak dapat terlaksanakan apabila sumber daya alam maupun sumber manusia itu tidak ada.

Konteks Implementasi Kebijakan Publik

Variabel konteks implementasi, meliputi kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik pemerintah dan kepatuhan dan daya tanggap yaitu kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan

implementasi suatu program. Aktor politik akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mengatakan bahwa Dalam pelaksanaan Program (Kotaku) tidak ada campur tangan aktor – aktor yang individual yang mementingkan kepentingannya sendiri, yang ikut bekerja sama dalam pelaksanaan ini, dimana program ini merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk masyarakat di Kabupaten Bantaeng khususnya di Kelurahan Letta.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Sebelum dilaksanakan program (Kotaku) ini kami selaku pendamping penyelenggara (Kotaku) menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini tidak ada campur tangan dari salah satu oknum yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tetapi ini merupakan program yang berasal dari

pusat dan diperuntukkan kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Letta khususnya daerah pesisir.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan bahwa kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat itu tidak ada campur tangan dari oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana program (Kotaku) ini merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat.

1. Karakteristik Pemerintah dan Lembaga

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who gets what atau siapa mendapatkan apa. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan karakteristik pemerintah dan lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa Dalam hal menyikapi pelaksanaan program Kotaku

saya selaku pemerintah setempat memberikan support serta dukungan yang penuh dalam menjalankan program ini karna memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat letta sendiri dimana program ini melibatkan masyarakat sendiri dalam proses pelaksanaan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak AS selaku ketua BKM Balla' Bassia yang menyatakan bahwa Dalam menyikapi program (Kotaku) mendapat pujian dan respon positif dari masyarakat letta tentang pelaksanaan program (Kotaku) ini dimana keindahan serta penataan lingkungan yang begitu teratata rapi menyebabkan masyarakat masih ingin dilaksanakan program Kotaku di kelurahan Letta khususnya di daerah pesisir pantai.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan bahwa karakteristik pemerintah dan lembaga itu mendapatkan respon yang baik dari pemerintah dan masyarakat sehingga para penyelenggara mampu memaksimalkan program ini sesuai pada standar operasional prosedur yang ada.

2. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai jika para implementor tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhandaribeneficiaries.

Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa Berkat program ini penyelenggara sangat berterima kasih, karena sesuai dengan target dan bahkan melebihi dari target karna adanya swadaya masyarakat sehingga program (Kotaku) ini bisa terlaksana dengan baik, dan dapat mengatasi kekumuhan di daerah pesisir, yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh lagi.

Hal tersebut sejalan dengan menyatakan bahwa Alhamdulillah masyarakat Letta khususnya daerah pesisir merasakan indahya panorama jalan di seputaran pantai yang tadi nya dipenuhi oleh sampah sekarang sudah tidak ada lagi sampah berserakan di jalan dan di pantai berkat program

Kotaku ini. Karena masyarakat sadar akan kekumuhan yang mengakibatkan kesehatan terganggu dan pencemaran lingkungan.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan tentang kepatuhan dan daya tanggap merupakan suatu tahap dimana akhir dari proses implementasi dilapangan tentang program (Kotaku) yang dilaksanakan oleh para penyelenggara yang mendapat persetujuan dan responsife yang positif dari masyarakat itu sendiri.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dalam penaganan kumuh yaitu (1) Tertanganinya kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Bantaeng, dilakukan secara komprehensif dan tuntas dengan target 0% (nol persen) luasan kumuh di Tahun 2019. (2) Terbentuknya rencana dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. (3) Terpadunya program kegiatan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh untuk menyelesaikan permasalahan kumuh Kelurahan Letta melalui berbagai pemangku

kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat. (4) Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama, terkait tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh untuk pengurangan luasan kumuh Kelurahan Letta. (5) Penguatan pemerintah Kelurahan Letta melalui perlibatan aktif dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. (6) Meningkatkan kapasitas masyarakat (BKM, KSM dan kelompok masyarakat) dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta untuk aktif berpartisipasi menjaga dan memelihara keberlanjutan penanganan yang diselenggarakan secara mandiri oleh kelompok maupun secara bersama dengan pemerintah kabupaten/kelurahan.

Berdasarkan beberapa unsur diatas, maka output/keluaran dari penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Letta ini adalah tercapainya dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang komprehensif, dilengkapi dengan skenario penanganan kumuh dan roadmap pengurangan kumuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang dilaksanakan melalui Program (Kotaku) oleh Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng sudah dilaksanakan secara baik, sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini berdasarkan pada penyediaan infrastruktur seperti : sanitasi , pasokan air layak konsumsi, dan penataan lingkungan dengan tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat peisisir Letta. Tetapi masih ada yang menjadi beberapa masalah dalam pelaksanaannya dimana dari segi penyediaan infrastruktur yaitu penyediaan jamban keluarga, serta penyediaan tempat sampah umum untuk masyarakat itu belum terealisasi secara maksimal mengakibatkan masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai sehingga menambah kekumuhan yang sudah ada, namun masalah yang terbilang cukup itu Pemerintah Kabupaten Bantaeng khususnya Dinas perumahan, Permukiman Dan Pertanahan sudah mengusulkan kepada

kementrian jendral cipta karya untuk mencari jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino , Leo . 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Public. Alfabeta Cv.Bandung
- Fermana Surya . 2009. Kebijakan Public Sebuah Tinjauan Filosofis.Ar-Ruzz Media : Jogjakarta
- Mulyadi Deddy.2016.Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Publik. Alfabeta: Bandung
- NugrohoRiant.2006.Kebijakan Publik Untuk Negara –Negara Berkembang.Pt.Elex Media Komputindo: Jakarta
- Nugroho Riant. 2007. Analisis Kebijakan. Pt Elex Media Komputindo: Jakarta
- Subarsono . 2008 . Analisis Kebijakan Public . Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Winarno Budi. 2007. Kebijakan Public Teori Dan Proses . Media Pressindo : Yogyakarta.
- Imas widiyanti. 2018. Impelementasi Program Kotaku dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh di Kricak Yogyakarta
- Penelitian kamalita anggung noor asih (2016) dengan judul “implementasi program (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan sukun kota Malang”
- Penelitian ardiansyah (2017) dengan judul “kebijakan pengentasan wilayah kumuh di kota tanjung pinang”
- Penelitian widyanarta rakandari (2018) dengan judul “implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan semanggi Surakarta”